

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2018, merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kota Bima. Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bima dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan ketahanan Keluarga .

LKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkap target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

### **1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM**

#### **1.2.1 . Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan. Langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bima melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018. LKIP diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban Dinas PP dan KB Kota Bima atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta atas penggunaan berbagai sumber daya Pemerintah.

Sedangkan yang menjadi tujuan Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dalam melaksanakan misinya.

### 1.2.2. Landasan Hukum

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188)
- Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) , dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Untuk uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan , uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Peraturan Kepala BKKBN No. 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE KRR;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota:
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Derah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
- Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 310)

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bimadan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dari :

#### **I. Kepala Dinas.**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas

- Lapangan KB dan Kader KB;
7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  8. pelaksanaan Pelayanan KB;
  9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  11. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **II. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. pengelolaan urusan ASN; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Yakni :

1.3.1.1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

1.3.1.1.2 Subbagian Pelaporan dan Keuangan

## **III. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Keluarga Berencana Melaksanakan Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
3. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
5. pelaksanaan Pelayanan KB;
6. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber KB.

#### **IV. Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi :

1. perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
  6. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
  8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya
- Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :
1. Seksi advokasi dan penggerakan;
  2. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
  3. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

#### **V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

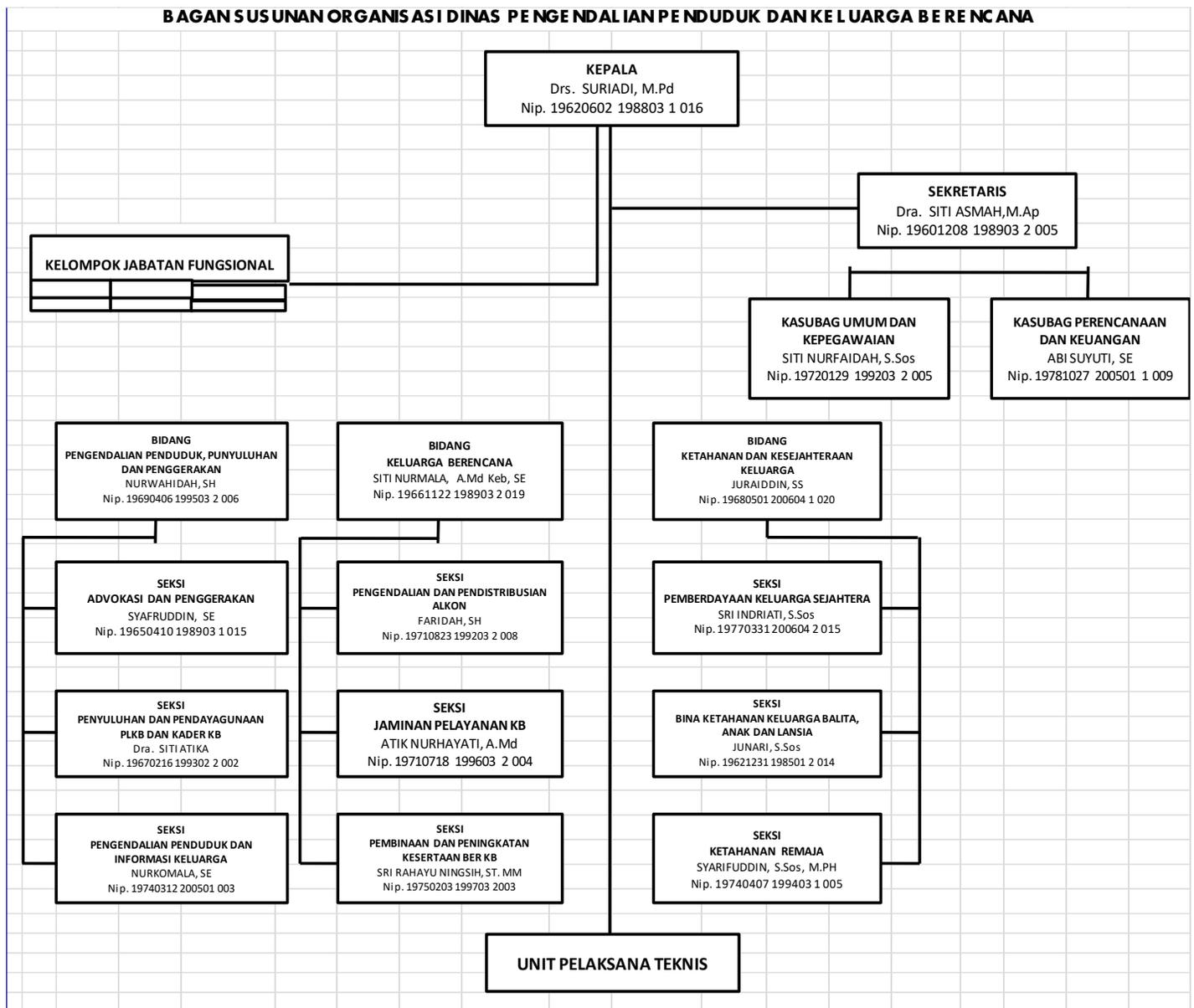
3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

- VI. Kelompok Jabatan Fungsional
- VII. Staf

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGEKENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang besar dalam hal pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima menemui kendala yang tidak sedikit, kendala dan permasalahan tersebut dirangkum dan dirumuskan menjadi isu strategis yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas PPKB Tahun 2013 – 2018. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun, isu – isu strategis ini dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKB. Isu strategis tersebut, antara lain :

- Bagaimana menekan Laju pertumbuhan penduduk (Total Fertility Rate/TFR) di wilayah kota Bima
- Menekan angka Unmet need yang masih tinggi
- Menekan angka putus pake (DO) akseptor KB yang masih tinggi

- Masih tingginya cakupan PUS yang usia istrinya dibawah 20 Tahun
- Kualitas data dan informasi keluarga belum akurat
- bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana dikota Bima
- upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga yang masih berada dibawah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut DPPKB Kota Bima telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis DPPKB Kota Bima

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan gambaran ke depan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan suatu Visi "***Terwujudnya generasi berkualitas melalui keluarga kecil bahagia sejahtera***".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima menetapkan misi sebagai berikut :

- a. *Meningkatkan Ketahanan Keluarga*
- b. *Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*
- c. *Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro*

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas

umumpenyelenggara Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas. Dalam penyelesaian mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara lain penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun tujuan, sasaran jangka menengah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disajikan dalam table berikut :

Tabel2.1.tujuandanSasaran Strategis Jangka Menengah DPPKB Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terkendalin ya jumlah penduduk dan meningkatn ya kesejahteraan keluarga	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2.8	2,6	2,4	2,61	2,34
		<b>MENINGKATNY A PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contrateptive prevelance rate/mCPR)	57,5 1%	58,0 5%	58,0 8%	61,2 7%	62,0 4

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	27,1 %	26,00 %	27,07 %	25.30 %	25,0 %
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	14.00 %	1324, %	12.65 %	6,27 %	5,00 %
			Persentase Peserta KB aktif MKJP	49,00 %	50,00 %	50,15 %	51.15 %	52,00 %
			Jumlah peserta KB aktif tambahan	12,30	12,45	12,50	12.74 %	13.00 %
			Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	65.00 %	70,00 %	82,00 %	85,00 %	85.00 %
2.	Peningkatan Kualitas Keluarga	MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibandingkan jumlah total keluarga	40%	45 %	45%	45%	30%

## 2.1 Penjelasan Indikator Utama Tahun 2018

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2017-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi DPPKB Kota Bima..

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Formulasi penjelasan Indikator Kerja Utama DPPKB Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,34	Jumlah Kelahiran Hidup laki2 dan perempuan hingga akhir masa reproduksi
2.	<b>MENINGKATKAN PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	62,04	Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern dibagi pasangan usia subur yang ber KB X 100
		Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00	Jumlah PUS ber KB yang putus pakai di bagi jumlah PUS ber-KB X 100%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	5,00	Jumlah PUS yang ingin ber KB tapi tak terlayani (lat + tial) di bagi jumlah PUS (15-49THN) X 100%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yg menjadi peserta KB aktif	85,00	Jumlah PUS yang menjadi Peserta KB aktif dibagi jumlah PUS X 100
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00	Jumlah PUS ber- KB MKJP dibagi jumlah PUS ber KB aktif X 100%
		Jumlah peserta KB aktif tambahan	13,00	Jumlah PUS Peserta KB baru di bagi Jumlah PUS ber KB X 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
3.	<b>MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30%	Jumlah keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibagi jumlah total keluarga x 100

### 2.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPPKB Kota Bima tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2018.

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPPKB Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,34
2	<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	62,04
		Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00
		Jumlah peserta KB aktif tambahan	13.00
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif	85.00
3	<b>MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30%

## 2.4. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian/Penetapan Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bima dapat dilihat dalam table sebagai berikut

Tabel : Penetapan Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2.34%
2.	<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	1 Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR) 2 Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) 4 Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif 5 Persentase Peserta KB aktif MKJP 6 Jumlah peserta KB aktif tambahan	62.04% 25.00% 5,00% 85% 52,00% 13,00%
3.	<b>MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	1 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 581,321,350	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 914,014,600	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 17,650,000	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp 143,105,650	
5	Program Keluarga Berencana	Rp 316,359,200	

6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	283,710,600
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp	1,492,302,000
9	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp	324,755,000
10	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi &Konseling KRR	Rp	30,767,100
11	Program peningkatanpenanggulanganNarkoba, PMS, termasukHIV/AIDS	Rp	-
12	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Rp	55,034,700
13	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.	Rp	13,724,800

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

LKIP 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Pengukuran Kinerja dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian sasaran dilakukandengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yangtelahditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam :

1. Indikator bermakna positif , artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecilrealisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus panjang

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Urutan	Rentang capaian	Kategori capaian
I	>100%	Sangat berhasil
II	91%-100%	Berhasil
III	81%-90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

### 3.1 Capaian tujuan Organisasi organisasi

Tujuan	Indikator tujuan		Target	Capaian	%
MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	prosentase keluarga prasejahtera	30 %	13,13%	43,77

Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kota Bima memiliki tujuan **meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**. berdasarkan survey penduduk DSKI jumlah keluarga pra sejahtera adalah 4,171 orang kepala keluarga 20,820 orang keluarga sejahtera I dan 6,772 orang kepala keluarga sejahtera II dibandingkan dengan seluruh keluarga yang terdata sejumlah 31.762 Kepala Keluarga. artinya dengan adanya program dan kegiatan DPPKB telah berhasil menurunkan jumlah keluarga prasejahtera menjadi 13.13 %.(Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13),

Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi, guna meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga .Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bima memiliki beberapa program dan kegiatan. Adapun capaian program dan kegiatan Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Tahun 2018 dalam rangka mendukung peningkatan Ketahanan dan kesejahteraan antara lain adanya peningkatan jumlah maupun pembinaan terhadap klpk Bina Keluarga Balita (BKB) dengan jumlah kelompok 55 klpk jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan 5.198 KK, Bina keluarga remaja (BKR) dengan jumlah kelompok sebanyak 25 kelompok dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan 2.568 KK, Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan jumlah kelompok 14 klpk. Dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan 479 KK. serta Usaha Peningkatan Pendapatan kesejahteraan social (UPPKS) dengan jumlah kelompok 1.065 kelompok, dengan kelompok UPPKS yang memperoleh atau dapat mengakses bantuan modal sebanyak 55 kelompok dengan jumlah modal sebanyak 318.500.000. .(Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13)

Data Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
		YANG ADA
1	Desa/Kelurahan	38
2	PLKB/PKB/ PetugaskB Desa	27
3	PPKBD	38
4	Sub PPKBD	220
5	Kelompok KB	539
6	Kelompok Kegiatan BKB	53
7	Kelompok Kegiatan BKR	25
8	Kelompok Kegiatan BKL	14
9	Kelompok Kegiatan UPPKS	92
10	Jumlah PIK R/M	57
11	a. Jumlah PIK R/M Tumbuh	32
	b. Jumlah PIK R/M Tegak	18
	c. Jumlah PIK R/M Tegar	7

Data Jumlah kelompok ketahanan keluarga BKB, BKR dan BKL Tahun 2018

NO.	URAIAN	BKB	BKR	BKL
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	5198	2568	479
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	4838	2202	451
3	Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan / penyuluhan	4553	1492	422
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS	4332	1756	377

5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus pusks dan KS	3931	1558	346
6	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	3589	1497	301
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KBKPS dan KS I	3454	1439	278
8	Jumlah Pertemuan/ penyuluhan kelompok kegiatan	54	23	17
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok Kegiatan BKB yang menggunakan KKA	1951		

Data jumlah anggota UPPKS Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah keluarga yang menjadi anggota Kelompok UPPKS	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS	1065
	b. Jumlah anggota Kelompok UPPKS KPS dan KS I	995
2	Status KB Anggota Kelompok UPPKS :	
	a. Anggota dari Seluruh Tahapan KS	
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	879
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	783
	b. Anggota dari Tahapan KPS dan KS I	
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang status PUS	698
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang status PUS ber KB	632
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	66

Sumber modal anggota UPPKS Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH SUMBER MODAL	JUMLAH MODAL (Rp.)
----	--------	---------------------	--------------------

4	Jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dan jumlahnya pada bulan ini :	55	318,500,000
	a. APBN	55	318,500,000
	b. APBD	0	0
	c. Krista	0	0
	d. KUR	0	0
	e. PNPM	0	0
	f. Lainnya	0	0

### 3.1.1. Capaian Kinerja organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bima memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, hasil pengukuran/ realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2.34%	2,29 %	102,14
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevelance rate/mCPR)	62.04%	100%	161,19
MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF	3	Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25.00%	20,63%	117,48
	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	5,00%	8,66%	26,80
	5	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85%	82,89%	97,52
	6	Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00%	51,70%	99,42
	7	Jumlah peserta KB aktif tambahan	13,00%	11,91%	91,62
MENINGKATNYA KETAHANA	8	Persentase keluarga pra sejahtera	30 %	13,13 %	106,67

<b>N DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>		dan keluarga sejahtera I			
-------------------------------------	--	--------------------------	--	--	--

## Sasaran

### 1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

**Indikator :Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran. Yakni angka kelahiran total dibandingkan dengan jumlah total Wanita Usia Subur sebagai mana tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.1.capaian sasaran stragis 1

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	<b>2.34%</b>	<b>29%</b>	102,14

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Angka Kelahiran total (Total FertilityRate/TFR)Per WUS yang di targetkan **2.34%**realisasi **2.29 %**atau102,14% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 163.101 jiwa dengan jumlah WUS (15-49 tahun ) sebesar 35.453 orang.tfr sebesar **2.29%**berarti wanita usia 15-49 thn secara rata2 mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis I pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2018 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel3.3.  
Perbandingan Realisasi KinerjaDPPKB  
dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,61%	2,36%	101,25%	2.34%	2.29 %	102,14

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran strategis I menunjukkan bahwa padatahun 2017 memiliki capain 101,25% sedangkan di tahun 2018menunjukkan peningkatan capaianyakni sebesar102,14% .

Pencapaian ini melampaui target nasional untuk TFR perwus dalam RPJM 2015-2019 sebesar 2,31

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

.Tabel 3.4.

Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun rencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2018	% Capaian
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK)	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,34 %	2,29 %	102,14 %

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama tahun 2018, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatanyang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK)	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	82.322.000
	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	51.722.000
	Operasional Kader pendataan keluarga	46.526.400
	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	36.920.000
	Koordinasi Pengelolaan Program	107.264.600

## 2 MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF	1	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevelance rate/mCPR)	62.04%	100%	161,19
	2	Presentase penurunan angka ketidak berlangsung pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25.00%	20,63 %	117,48
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,00%	8,66%	26,80
	4	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85%	82,89%	97,52
	5	Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00%	51,70%	99,42
	6	Jumlah peserta KB aktif tambahan	13,00%	11,91%	91,62
<b>Rata-rata</b>			<b>40,43%</b>	29,47%	99,01

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis II pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2018 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel3.3.  
Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB  
dalam Pencapaian Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevelance rate/mCPR)	61,27%	50,31%	82,11	62.04%	100%	161,19

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,30 %	13,28 %	190,51 %	25.00%	20,63	117,48
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,27 %	8,86 %	70,77 %	5,00 %	8,66%	26,80
Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85,00 %	86,63 %	101,17 %	85%	82,89%	97,52
Persentase Peserta KB aktif MKJP	51,15 %	50,13 %	98,01 %	52.00 %	51,70%	99,42
Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,74 %	11,12 %	405,84 %	13.00 %	11,91%	91,62
Rata-rata	38,62	36,17	158,07	40,34	45,97	99,01

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4.  
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2018	% Capaian
<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	62,04%	100%	161,19

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2018	% Capaian
	Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00%	20,63%	117,48
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,00%	8,66%	26,80
	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85,00%	82,89%	97,52
	Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00%	51,70	99,42
	Jumlah peserta KB aktif tambahan	13,00%	11,91%	91,62
<b>Rata-rata</b>		40,34%	45,97%	99,01%

### 1. Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)

Tingkat capaian kinerja untuk indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence(mCPR) yang ditargetkan sebesar 61,27% terealisasi sebesar 100 % atau 161,19 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah pemakaian kontrasepsi modern (IUD, MOW,MOP,IMP,STK,PIL) adalah 24.718 Akseptor dari seluruh peserta KB aktif sejumlah 24.718 Akseptor.

Pencapaian kinerja indikator presentase pemakaian kontrasepsi modern tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017 sebesar 51,32% ( 12.054 Akseptor dan 23.486 peserta KB Aktif). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100% masuk dalam kategori capaian “cukup berhasil”.

### 2. Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

Tingkat capaian kinerja untuk indikator angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi atau drop out yang ditargetkan sebesar 25,00 %

teralisasi sebesar 20,63 % atau 117,48% dari target yang ditetapkan. Dengan penjelasan jumlah akseptor yang mengalami tingkat putus alat kontrasepsi atau D.O sejumlah 5.100 dari seluruh peserta KB aktif sejumlah 24.718 akseptor. Dibandingkan dengan angka drop out pada tahun 2017 adalah sebesar 4.806 orang atau 20%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 117,48% masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”.

### **3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 05.00% realisasi 08,66% atau 26,80 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 2.583 Akseptor terdiri dari Jumlah Ingin Anak Ditunda (IAD) 1.261 Akseptor dan Jumlah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) 1.229 Akseptor. dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 29.818 (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/13),

pencapaian pada tahun 2018 tingkat indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB (unmet need) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 08,86 %., sedangkan target nasional unmet need 2018 adalah sebesar 9,91 %. artinya untuk target unmet need kota Bima telah melampaui target nasional. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 8,66% atau mencapai 26,80 yang berarti masuk dalam kategori capaian “Kurang berhasil”.

### **4. Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif**

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif Kota Bima terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 85,00 % realisasi 82,89 % atau terealisasi sebesar 97,52 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif 24.718 Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 29.818, ini berarti mengalami penurunan dibandingkan tingkat capaian pada tahun 2017. Realisasi capaian peserta KB aktif untuk tahun 2017 adalah sebesar 86,63 %. Sedangkan target nasional (target SPM) sebesar 77,5% (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/13), Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 97,52 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”

### **5. Jumlah peserta KB aktif tambahan**

Tingkat capaian kinerja untuk indikator peserta KB aktif tambahan yang ditargetkan sebesar 12,74 % realisasi sebesar 11,91% atau sebesar 91,62 % dari target yang ditetapkan. Dengan penjelasan peserta KB aktif tambahan berjumlah 2.944 akseptor. Terdiri dari IUD 406 Akseptor, MOW 43 Akseptor, MOP 0, Kondom 78 Akseptor, Implan 1.175 Akseptor, suntik 1.304 Akseptor serta PIL 52 Akseptor. Dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2017 sebesar 78%. (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 91,62 % masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”

## 6. Persentase Peserta KB aktif MKJP

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB aktif MKJP yang di targetkan 52,00 % realisasi 51,70 % atau 99,42 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB MKJP 12.781 Akseptor terdiri dari IUD 6.656 Akseptor, MOW 1.223 Akseptor, MOP 73 Akseptor dan Implant 4.829 Akseptor. Pencapaian peserta KB aktif MKJP tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2017 sebesar 98,05% . (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), namun dibandingkan dengan target nasional, target peserta KB aktif kota Bima telah melampaui target nasional sebesar 23,91%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 99,42 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II tersebut, selama tahun 2018, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatan yang dijabarkan ke dalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran (Rp)
	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	91.970.000
	Pelayanan KIE	119.425.000
	Pembinaan Keluarga Berencana	51.270.000
	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	26.215.000
	Pelayanan konseling KB	546.375.000
	Pengadaan alat kontrasepsi	201.053.000

### 3 MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

#### Indicator Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel3.1.  
Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB  
dalam Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30%	13,13%	43,77%

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis III pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2018 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel3.2.  
Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB  
dalam Pencapaian Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	45%	40%	128,89% %	30%	13,13 %	106,67

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3.  
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis III terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2018	% Capaian
<b>MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30 %	13,13 %	106,67

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III tersebut, selama tahun 2018, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatanyang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III	Jumlah Anggaran (Rp)
	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	21.070.000
	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	91.874.600

### 3.1.3. Capaian kinerja eselon III dan eselon IV

Dinas Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas terdiri dari tiga bidang dan secretariat, berikut akan ditampilkan capaian kinerja eselon III dan eselon IV berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan tahun 2018.

BIDANG	Program /kegiatan	Indikator prog/keg	Target	Capaian	% Capaian
<b>Kabid p4kb</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	Jumlah masyarakat peduli KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	80%	80 %	100 %
Seksi pengendalian penduduk dan	monitoring kegiatan pendataan keluarga	Cakupan monitoring dan evaluasi	80%	80%	100%

informasi keluarga		kegiatan pengelolaan data dan informasi prog.KB			
Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga	operasional kader Pendata Keluarga	terlaksananya pembayaran pengganti uang operasional Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	100%	100%	100%
Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga	orientasi kader pendata keluarga	terlaksananya orientasi para kader (PPKBD dan sub PPKBD)	100%	100%	100%
Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB	Koordinasi pengelolaan program	meningkatnya kegiatan kemitraan dalam penggarapan program Kependudukan	80%	80%	100%
seksi Advokasi dan Penggerakan	pembentukan masyarakat peduli kb	cakupan kelompok KB yang diberi penyuluhan dan sosialisasi	80%	80%	100%

Data diatas menunjukkan pencapaian kinerja program dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakkan memenuhi target yang ditetapkan. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri terdiri dari lima kegiatan dengan indikator program terbentuknya masyarakat peduli kb. Masyarakat peduli KB terdiri dari kelompok kerja Pembantu penyuluh Keluarga berencana desa/kelurahan (PPKBD) dan sub PPKBD di lima kecamatan yang saat ini berjumlah 38 orang dan sub PPKBD berjumlah 220 orang dengan rasio satu kelurahan satu orang PPKBD dan dua orang sub PPKBD persatu kelurahan. Saat ini telah ditetapkan sebanyak 16 kampung KB di 16 kelurahan yang ada.

BIDANG KB	Program /kegiatan	Indikator prog/keg	Target	Capaian	realisasi
Kabid. KB	Program Keluarga Berencana	Persentase kehamilan yang tidak di inginkan dari PUS (15-49	6.9%	6,9%	100 %

		tahun)			
<b>seksi Jaminan Pelayanan KB</b>	Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Persentase akseptor kb yang dilayani serta menurunnya Unmet Need pada 5 Kecamatan	85%	85%	100 %
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	pembinaan keluarga berencana	Cakupan kelompok KB yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	70%	70%	100 %
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	Pelayanan KIE	cakupan kelompok masy.peduli KB yang diberi penyuluhan dan sosialisasi	100%	100%	100%
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	rapat kerja daerah program keluarga berencana	meningkatnya kegiatan kemitraan dalm penggarapan program KB	100%	100%	100%
<b>Kabid. KB</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	Cakupan Penyediaan Alat kontrasepsi dan obat untuk memenuhi permintaan masyarakat 30%	65.60%	65.60%	100 %
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	pelayanan konseling KB	cakupan Faskes/klinik KB yang dibina	100%	100%	100%
<b>seksi pengendalian dan pendistribusian Alkon</b>	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Cakupan sarana dan prasarana klinik pelayanan KB yang memenuhi standart	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

Data diatas menunjukkan pencapaian kinerja program dibidang Keluarga Berencana memenuhi target yang ditetapkan. Indicator program keluarga

berencana berupa menurunnya tingkat kehamilan yang tidak diinginkan dari pasangan usia subur umur 15-19 Tahun yang hanya mencapai 6,9 %. Adanya peningkatan Pencapaian kb aktif sebesar 82 % atau 24.718 akseptor dari pasangan usia subur sebesar 29.818. pencapaian ini ini dikarenakan intensifnya kegiatan pembinaan dan Konseling terhadap seluruh pasangan usia subur, terpenuhinya fasilitas Kb diseluruh faskes / klinik KB yang ada pada lima kecamatan.

<b>BIDANG KS</b>	<b>Program /kegiatan</b>	<b>Indikator prog/keg</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>realisasi</b>
<b>Kabid.Ketahanan dan Kesga</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	Persentase angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	65.60%	65.60%	100%
Kabid.Ketahanan dan Kesga	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	Median usia kawin pertama wanita	20.60%	20.60%	100%
Kabid.Ketahanan dan Kesga/ seksi ketahanan remaja	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>  Penyuluhan Penanggulangan bahaya Narkoba dan PMS di sekolah	Cakupan kelompok PIK-RR yang aktif	0	0	0
Kabid.Ketahanan dan Kesga/kasi ketahanan balita,anak dan lansia	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>  Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase BKB yang mendapatkan pembinaan yang aktif	80%	80%	100%
Kabid.Ketahanan dan Kesga / kasi ketahanan balita,anak dan lansia	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>  Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Cakupan tenaga pendamping bina keluarga terlatih	80%	80%	100%

seksi ketahanan remaja	advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan klpk generasi berencana disekolah yang aktif	80%	80%	100%
seksi ketahanan remaja	memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	terlaksananya hari keluarga Nasional tk.Kota Bima Thn.2018	100%	100%	100%
seksi ketahanan remaja	pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan forum pusat informasi konseling remaja dan forum pelayanan KRRbagi klpk sebaya yang aktif	100%	100%	100%
seksi ketahanan remaja	kegiatan pendampingan pelayanan KRR bagi klpk Remaja dan klpk sebaya diluar sekolah	jumlah kelompok PIK-RR dan PIK Mahasiswa	100%	100%	100%
seksi ketahanan remaja	memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	terlaksananya hari keluarga Nasional	100%	100%	100%

Data diatas menunjukan tingkat capaian program dan kegiatan pada bidang KS mencapai 100%. Program dan kegiatan bidang ketanan dan kesejahteraan terutama melalui program / kegiatan pendirian pusat informasi dan konseling bagi remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada para remaja, pembinaan terlaksananya kegiatan KIE tentang KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan capaian sebesar 20.60%, telah berhasil menurunkan angka kelahiran pada remaja 65,50%. Untuk memperkuatdukungan dan partisipasi masyarakat dalam rangka program kb di kota bima telah dilaksanakan kegiatan hari keluarga nasional (harganas).

#### **3.1.4. Realisasi Anggaran**

Sesuai dengan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 untuk mendukung sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dilaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 44 kegiatan.danrealisasi keuangan untuk masing – masing program dan kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>JUMLAH PENDAPATAN (10 s/d 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>BELANJA</b>				
9	<b>BELANJA OPERASI</b>				
10	Belanja Pegawai	2.518.515.768,25	2.414.364.079,00	95,86	3.657.070.464,00
11	Belanja Barang	2.793.768.100,00	2.364.280.436,00	84,63	1.571.236.136,00
12	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Bantuan Sosial	104.852.000,00	103.952.000,00	99,14	264.301.000,00
14	<b>Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 14)</b>	<b>5.417.135.868,25</b>	<b>4.882.596.515,00</b>	<b>90,13</b>	<b>5.492.607.600,00</b>
15	<b>BELANJA MODAL</b>				
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	492.072.400,00	491.261.000,00	99,84	418.762.000,00
18	Belanja Bangunan dan Gedung	292.900.000,00	292.475.000,00	99,85	261.985.000,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Jumlah Belanja Modal (16 s/d 20)</b>	<b>784.972.400,00</b>	<b>783.736.000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>680.747.000,00</b>
22	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
23	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>JUMLAH BELANJA (14 + 21 + 24)</b>	<b>6.202.108.268,25</b>	<b>5.666.332.515,00</b>	<b>91,36</b>	<b>6.173.354.600,00</b>
26	<b>SURPLUS / (DEFISIT) (7 - 25)</b>	<b>(6.202.108.268,25)</b>	<b>(5.666.332.515,00)</b>	<b>91,36</b>	<b>(6.173.354.600,00)</b>
27	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 26)</b>	<b>(6.202.108.268,25)</b>	<b>(5.666.332.515,00)</b>	<b>91,36</b>	<b>(6.173.354.600,00)</b>

### 3.1.4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

#### a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA tahun 2018 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dianggarkan karena tidak memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Daerah.

#### b. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung.

Secara umum Belanja tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 6.202.108.265,25 dan terealisasi sebesar Rp5.666.332.515,00 atau 91,36 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 535.775.753,25. Terjadi penurunan realisasi belanja tahun 2018 sebesar (Rp 507.022.085,00) atau (8,21%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp 6.6173.354.600,00. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada program pelayanan kontrasepsi yang berasal dari dana DAK untuk Biaya Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB).

Tabel : 3.1. Belanja Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Operasi	5.417.135.868,25	4.882.596.515,00	90,13	5.492.607.600,00
2.	Belanja Modal	784.972.400,00	783.736.000,00	99,84	680.747.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.202.108.268,25</b>	<b>5.666.332.515,00</b>	<b>91,36</b>	<b>6.173.354.600,00</b>

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 5.417.135.868,25 dan terealisasi sebesar Rp 4.882.596.515,00 atau 90,13%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 534.539.353,25. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 97,62% atau sebesar Rp 5.492.607.600,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar (Rp 610.011.085,00) atau (11,11%).

Belanja Operasi tahun 2018 terdiri dari :

Tabel : 3.2. Belanja Operasional

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Pegawai	2.518.515.768,25	2.414.364.079,00	95,86	3.657.070.464,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.793.768.100,00	2.364.280.436,00	84,63	1.571.236.136,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	104.852.000,00	103.952.000,00	99,14	264.301.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.417.135.868,25</b>	<b>4.882.596.515,00</b>	<b>99,13</b>	<b>5.492.607.600,00</b>

### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.518.515.768,25 dan terealisasi sebesar Rp 2.414.364.079,00 atau 95,86%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 104.151.689,25. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 3.657.070.464,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar (Rp 1.242.706.385,00) atau sebesar (51,47%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.3. Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
<b>I.</b>	<b>Belanja Pegawai - Tak Langsung</b>				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.763.563.268,25	1.744.304.579,00	98,91	2.969.758.589,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	265.800.000,00	217.692.500,00	81,90	402.366.875,00
<b>II.</b>	<b>Belanja Pegawai - Langsung</b>				
1.	Honorarium PNS	489.152.500,00	452.367.000,00	92,48	284.945.000,00
2.	Honorarium Non PNS				0,00
<b>Jumlah (I+II)</b>		<b>2.518.515.768,25</b>	<b>2.414.364.079,00</b>	<b>95,86</b>	<b>3.657.070.464,00</b>

### 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.793.768.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.364.280.436,00 atau 84,63%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 429.487.664,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1.571.236.136,00 maka realisasi Belanja Barang dan

Jasa tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp 793.044.300,00 atau 33,54% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 3.3. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	205.438.000,00	169.050.825,00	82,29	164.050.900,00
2.	Belanja Bahan/Material	43.010.600,00	33.009.400,00	76,75	66.709.900,00
3.	Belanja Jasa Kantor	296.680.000,00	277.759.584,00	93,62	167.600.026,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.956.000,00	130.549.780,00	86,48	115.824.150,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.526.250,00	31.477.000,00	77,67	15.085.000,00
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	500.000,00	50,00	0,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.045.000,00	52.720.000,00	97,55	25.014.500,00
9.	Belanja Makanan dan Minuman	323.810.000,00	238.082.000,00	73,53	179.926.000,00
10.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
11.	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Belanja Perjalanan Dinas	479.668.750,00	472.776.347,00	98,56	334.002.860,00
13.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	1.031.175.000,00	846.900.000,00	82,13	378.975.000,00
14.	Belanja Hadiah	31.550.000,00	31.550.000,00	100,00	24.350.000,00
15.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	135.908.500,00	79.905.500,00	58,79	66.698.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.793.768.100,00</b>	<b>2.364.280.436,00</b>	<b>84,63</b>	<b>1.571.236.136,00</b>

### 3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja barang (hibah) yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat/pihak ketiga sehingga tidak diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. Belanja Bantuan sosial untuk Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp104.852.000,00 dan direalisasi sebesar Rp103.952.000,00 atau 99,14% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 900,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar RpRp 264.301.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial menunjukkan penurunan sebesar (Rp 160.349.000,00) atau (154,25%).

Tabel : 3.4. Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat/Pihak ketiga	104.852.000,00	103.952.000,00	99,14	264.301.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>104.852.000,00</b>	<b>103.952.000,00</b>	<b>99,14</b>	<b>264.301.000,00</b>

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp784.972.400,00 dan terealisasi sebesar Rp783.736.000,00 atau 99,84% sisa Rp 1.236.400,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp680.747.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp 102.989.000,00 atau 13,14%.

Tabel : 3.5 Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
<b>A.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00		0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	186.852.000,00	186.642.000,00	99,89	0,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	278.906.000,00	278.306.000,00	99,78	118.709.000,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00		264.553.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
6.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	3.600.000,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	14.914.400,00	14.913.000,00	99,99	31.900.000,00
8.	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00		264.553.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>492.072.400,00</b>	<b>491.261.000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>418.762.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan</b>				
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	292.900.000,00	292.475.000,00	99,85	261.985.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>292.900.000,00</b>	<b>292.475.000,00</b>	<b>99,85</b>	<b>261.985.000,00</b>
<b>Jumlah (A+B)</b>		<b>784.972.400,00</b>	<b>783.736.000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>680.747.000,00</b>

Tabel 3.6 Perbandingan target dan realisasi kinerja Anggaran SKPD DPPKB tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.268.000	65.268.000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.560.000	38.790.385	100
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38.600.000	37.874.375	98,12
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.120.000	69.270.000	98,79
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.366.000	16.366.000	100
6.	Penyediaan alat tulis kantor	32679300	32679300	100
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.220.000	30.980.000	96,16
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.105.000	2.102.000	99,86
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.500.000	18.500.000	100
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	3.490.000	96,94
11.	Penyediaan makanan dan minuman	18.660.000	14.884.000	79,76
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.334.000	219.574.340	96,59

13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.585.000	9.510.000	99,22
<b>B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	663.970.000	628.832.000	96,77
2.	Pengadaan mebeluer	3.600.000	3.600.000	100
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.349.000	12.349.000	100
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.628.000	94.320.950	96,61
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.265.000	2.3265.000	100
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.450.000	24.450.000	100
<b>C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33.000.000	33.000.000	100
<b>D. PROGRAM PENINGKATAN KPASITAS SDM APARATUR</b>				
1.	Pelaksanaan Penilaian AKJG	17.780.000	17.780.000	100
<b>E.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.760.000	21.760.000	100
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.520.000	9.520.000	100
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.520.000	9.520.000	100
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.120.000	40.120.000	100
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	19.040.000	19.040.000	100
<b>F. PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>				
1.	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	91.970.000	90.220.000	98,10
2.	Pelayanan KIE	119.425.000	119.425.000	100
3.	Pembinaan Keluarga Berencana	51.270.000	51.270.000	100
4.	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	26.215.000	25.760.520	98,27
<b>G.PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>				

1.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	23.850.000	23.850.000	100
2.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	91.874.600	91.162.500	99,22
<b>H. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI</b>				
1.	Pelayanan konseling KB	546.375.000	495.317.393	90,66
2.	Pengadaan alat kontrasepsi	201.053.000	200.089.000	99,52
<b>I. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI</b>				
1.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	54.819.500	51.331.000	93,64
2.	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	43.858.000	41.127.000	93,77
3.	Operasional Kader pendataan keluarga	45.960.000	44.880.000	97,65
4.	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	15.060.000	10.260.000	68,13
5.	Koordinasi pengelolaan program	34.517.500	26.707.000	77,37
<b>J.PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR</b>				
1.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	15.872.500	15.872.500	100
2.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	7.240.000	7.240.000	100
<b>K. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS</b>				
1.	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	11.010.000	11.010.000	100
<b>L. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK</b>				
1.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	29.280.000	29.280.000	100
<b>M.PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>				
1.	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	21.070.000	21.070.000	100

### **3.2.1 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN:**

a. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif; Pencapaian akseptor KB aktif tambahan , meningkatnya penggunaan kontrasepsi modern, serta menurunnya angka Drop Out/ Ketidak Kelangsungan KB pada Tahun 2018 yang dapat memenuhi target dan bahkan melampaui target propinsi dan Nasional menandakan tingginya kesadaran masyarakat terutamapasangan usia subur akan pentingnya program keluarga berencana yang pada akhirnya dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal antara lain :

- Adanya kuantitas dan kualitas pelayanan KB yang semakin baik.
- Adanya garis komando dan garis koordinasi yang jelas
- Adanya pembagian tugas yang jelas di jajaran DPPKB .
- Adanya penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang selalu ada pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Klinik KB).
- Adanya segmentasi sasaran yang jelas, sehingga mengetahui siapa dan dimana PUS yang belum ber-KB
- Kemampuan dan kapasitas tenaga lini terdepan yaitu Penyuluh KB yang semakin baik,
- Adanya kerjasama maupun dengan stakeholder (mitra kerja) yang ada seperti Kantor Kementerian Agama kota Bima, Penyuluh Agama, Dinas Kesehatan, Kepala KUA Kecamatan serta institusi-institusi Kelurahan yang ada seperti PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka ikut menyukseskan pengelolaan program keluarga berencana
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR, serta BKL. Selain itu pada tahun 2018 dilakukan orientasi BKB, BKR, BKL bagi kader dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan KS I. Dan melakukan advokasi/KIE kepada Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan LSM dalam rangka meningkatkan pencapaian program dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dimasing-masing kelurahan, sehingga program KB merupakan kebutuhan bagi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

b. Presentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) belum dapat memenuhi target baik target kota maupun target Nasional (SPM) hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain :

- Aktifitas pendataan yang masih kurang maksimal
- Jaringan pelayanan yang masih kurang
- Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang belum optimal
- Kurangnya anggaran sosialisasi/ promosi KB
- Kurang optimalnya monitoring di lini lapangan

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB di seluruh kecamatan dan kelurahan sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB, serta dengan mengintensifkan pelayanan KIE serta promosi KB

### 3.3.2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Pemanfaatan sumberdaya yang ada pada DPPKB Kota Bima, dapat dikatakan efisien, karena dengan anggaran yang terbatas, dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang sangat tinggi. Dari sisi sumberdaya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik.

Realisasi anggaran DinasPP dan KB Kota Bima Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 5.666.332.515,00,-** atau **91,36 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 6.202.108.268,25**.

Rincian Realisasi Anggaran yang telah digunakan Tahun 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 15. RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BPPKB TAHUN 2018

No	Uraian	Anggaran Yang Tersedia (Rp)	Realisasi Anggaran Yang digunakan (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.029.363.268,25	1.961.997.079	96,68
2.	Belanja Langsung	4.172.745.000.00	3.704.335.436	88,87
JUMLAH		6.202.108.268.25	5.666.332.515,00	<b>91,36</b>
1.	Kegiatan yang terhambat tidak ada.	-	-	-
JUMLAH			Rp. 0.00	

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Media ini juga dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan program pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga tahun 2018. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indicator kinerja bidang pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, tujuh dari delapan indicator dapat memenuhi dan bahkan melampaui target yang ditetapkan dan hanya satu indicator yang belum memenuhi target yang ditetapkan .
2. Keberhasilan yang dimaksud di atas adalah besarnya capaian kinerja yang lebih besar dari target, baik itu target tahun 2018, target RPJMD maupun target nasional strategis.

Realisasi anggaran pada Badan PP dan KB Kota Bima Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 5.666.332.515,00,-** atau **91,36 %** dari pagu anggaran sebesar **6.202.108.268,25**.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kami buat, semoga bermanfaat, terima kasih.

Raba-Bima, Januari 2019  
Kepala DPPKB Kota Bima,

**Drs. Suriadi, M.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19620602 198803 1 016